



RENCANA KERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN PESISIR
DAN LAUT

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, Januari 2020

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur agar lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya, telah disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Direktorat lingkup Ditjen PPKL. Dan sebagai turunannya, dalam melaksanakan kegiatan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan di kawasan pesisir dan laut, telah pula disusun suatu Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Direktorat PPKPL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020.

Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut secara akuntabel.

Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Direktorat PPKPL untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Direktorat PPKPL khususnya dan Ditjen PPKL umumnya.

Jakarta, Januari 2020
Direktorat Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Direktur,



Ir. Dida Migfar Ridha, Msi
NIP : 19680510 199403 1 001

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Mekanisme Penyusunan | 2 |
| C. Program Tahun 2010-2014..... | 2 |
| D. Capaian IKU dan IKK Tahun 2019..... | 3 |
| E. Program Tahun 2015-2019..... | 4 |
| BAB II SASARAN STRATEGIS 2019..... | 5 |
| A. Sasaran Strategis Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 5 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | 8 |
| 3.1. Arah Kebijakan | 8 |
| 3.2. Program Tahun 2019..... | 8 |
| 3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2019 | 9 |
| BAB IV PENUTUP | 12 |
| LAMPIRAN | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut telah pula disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2020 merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020-2024 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020 (Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020) disusun dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada kawasan pesisir dan laut yang efektif dan efisien lingkup Ditjen. PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2020 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2020, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun 2020, arah kebijakan dan strategi Direktorat PPKPL tahun 2020, kendala dan tantangan, perubahan

struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Perubahan struktur organisasi dan pengesahan anggaran yang efektif mulai berlaku pada pertengahan tahun ini, mempengaruhi perencanaan kerja di Direktorat PPKPL. Penyusunan Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan sub direktorat-sub direktorat yang berada di lingkup Direktorat PPKPL. Masing-masing sub direktorat mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

C. Program Tahun 2020

Sasaran prioritas nasional Tahun 2020-2024 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran,
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2020-2024 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfokus pada hasil kerja berupa tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung peningkatan kualitas udara, air, tutupan lahan dan kualitas air laut. Selain itu, Ditjen. PPKL melakukan pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Ditjen. PPKL melakukan pengelolaan kesatuan hidrologi gambut.

Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Tabel 1 berikut ini. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| a. | Meningkatnya Kualitas Udara. | Indeks Kualitas Udara Meningkat | 82 | TBA |
| b. | Meningkatnya Kualitas Air. | Indeks Kualitas Air Meningkat | 53 | TBA |
| c. | Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan. | Indeks Tutupan Lahan Meningkat | 60 | TBA |
| d. | Meningkatnya kualitas air laut | Indeks Kualitas Air Laut | 58.5 | TBA |

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian |
|--|--|---|---------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3) | | | | |
| | Meningkatnya pelaksanaan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut | Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya | 4 kawasan prioritas | TBA |
| | Meningkatnya jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 34 provinsi | TBA |
| | Meningkatnya jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 34 provinsi | TBA |

Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020

D. Capaian IKU dan IKK Tahun 2020

1. Capaian IKU Tahun 2020

Untuk menyiapkan target capaian kinerja Direktorat PPKPL, dilaksanakan perbandingan pengukuran capaian kinerja tahun 2020 dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Realisasi pencapaian target-target IKU yang ditetapkan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Target pencapaian kinerja Direktorat PPKPL Tahun 2020

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2018 | Target 2019 |
|-----|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya | Pemulihan ekosistem pesisir dan laut pada kawasan prioritas | 3 lokasi Kab. Wakatobi, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Jepara (Karimunjawa) | 4 lokasi Kab. Selayar, Kota Ternate, Kab. Lombok Utara dan kab. Berau |
| | | Terlaksananya inventarisasi ekosistem terumbu karang dan lamun | 1 lokasi Kep. Riau | 2 lokasi Prov. Maluku dan Prov. Maluku Utara |
| 2 | Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 34 Provinsi | 34 Provinsi |
| | | Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan di pelabuhan | 9 pelabuhan Belawan, Batam, Teluk Bayur, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Balikpapan | 20 pelabuhan |
| | | Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 50 izin | 74 izin |
| | | Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan | 1 laporan kegiatan | 1 laporan kegiatan |
| | | Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 2 dokumen | 2 dokumen |
| | | Pengembangan Program Pesisir dan Laut Lestari | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 3 | Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | Penanggulangan pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut | Penanggulangan pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut | 2 lokasi Batam dan Bintan |
| | | Pemantauan sampah laut dan integrated coastal clean up | 5 lokasi clean Up dan 20 Pemantauan Sampah laut | 34 Provinsi |

2. Capaian IKK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam 3 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2020 yaitu:

a. Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya

Indikator pencapaian sasaran terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir dan laut adalah dengan melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebanyak 3 (tiga) lokasi ekosistem,. Yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Lombok Tengah (Mandalika) dan Kabupaten Jepara (Kepulauan Karimunjawa).

b. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya

Indikator pencapaian sasaran jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya adalah dalam pelaksanaan tersedianya data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di 34 provinsi

c. Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut

Indikator pencapaian sasaran peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut dalam bentuk pemantauan sampah laut dan penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak dilaksanakan di 24 kabupaten/kota dan 3 lokasi tumpahan minyak

3 Program Tahun 2020

a. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dan untuk mendukung terhadap sasaran strategis Kementerian dalam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ditjen PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Dimana ketiga peran tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknis pada Ditjen PPKL. Adapun target untuk Indikator Kinerja Utama/Indikator

Kinerja Program Ditjen PPKL Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam 3 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2020 yaitu:

a. Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya

Indikator pencapaian sasaran terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir dan laut adalah dengan melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebanyak 4 (empat) lokasi ekosistem.

b. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya

Indikator pencapaian sasaran jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya adalah dalam pelaksanaan tersedianya data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di 34 provinsi

c. Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut

Indikator pencapaian sasaran peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut dalam bentuk pemantauan sampah laut dan penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak dilaksanakan di 34 provinsi dan 2 lokasi tumpahan minyak

| PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN | Meningkatnya Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara Meningkat | 83 |
| | Meningkatnya Kualitas Air | Indeks Kualitas Air Meningkat | 54 |
| | Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan | Indeks Tutupan Lahan Meningkat | 61 |
| | Meningkatnya Kualitas Air Laut | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | 58,5 |

Tabel 4 : Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL/IKU Tahun 2020

Tabel 5 : Target pencapaian kinerja Direktorat PPKPL Tahun 2020

| KODE | OUTPUT | VOLUME | JUMLAH (x1000) | % |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| 5460 | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | | 25.300.000 | 100% |
| 5460.001 | Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya | 4 Lokasi | 5.900.000 | 23,23% |
| 5460.006 | Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 34 provinsi | 15.229.600 | 60,19% |
| 5460.007 | Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 34 provinsi | 4.170.000 | 16,48% |

BAB II

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

A. Sasaran Strategis Tahun 2019 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Dalam Draft Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 disampaikan mengenai potensi dan permasalahan **Wilayah Pesisir dan Laut** bahwa , “Sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat.

Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km dan termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia”.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menungaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L secara umum, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor : B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah : “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ” Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : “ **KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.**

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni : “ Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan ” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan rumusan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi KLHK yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Kemudian dalam merealisasikan Visi dan Misi di atas, terdapat 4 pilar pembangunan yang harus diperhatikan untuk menopang keberlanjutan pembangunan nasional yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tabel 7 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

| |
|---|
| Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024 |
| “Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif” |
| Indikator Tujuan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi |
| Sasaran Program |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
| Sasaran Kegiatan Direktorat PPKPL. PPKL |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 2. Menurunnya Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut |
| Sasaran Unit Kegiatan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 2. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya 3. Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut |

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2020 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat PPKPL adalah kepada Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Air Laut, dengan mengacu pada 3 (tiga) pokok pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, yaitu : 1) Pemulihan, 2) Penanggulangan; dan 3) Pencegahan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Direktorat PPKPL dalam melaksanakan programnya diantaranya :

- Kualitas air diperairan pantai pada 34 provinsi
- Pemantauan sampah laut pada 34 provinsi
- Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 4 lokasi ekosistem terumbu karang

B. Program Tahun 2020

Direktorat PPKPL menjadi penanggungjawab kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut memiliki tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan yakni peningkatan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 58.5 nilai indeks sesuai baseline data tahun 2019. Hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional dan kontrak kinerja Direktur PPKPL dengan Dirjen PPKL sebagaimana tercantum pada Bab sebelumnya.

| PROGRAM | SASARAN | TARGET |
|--|---|-------------|
| Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir dan Laut | Meningkatnya Kualitas Air Laut melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 34 provinsi |

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020

a. Pembiayaan Direktorat PPKPL Ditjen. PPKL Tahun 2020

| KODE | URAIAN | VOLUME | ANGGARAN |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 5460 | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut | | 25.300.000.000 |
| 5460.001 | Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya | 4 Lokasi | 5.900.000.000 |
| 5460.001.001 | Pemulihan ekosistem pesisir dan laut pada kawasan prioritas | | 5.900.000.000 |
| 051 | Pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang | | 3.900.000.000 |
| | Wilayah I | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| | Wilayah II | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| 053 | Inventarisasi Ekosistem Pesisir dan Laut | 2 lokasi | 2.000.000.000 |
| | Provinsi Maluku dan Provinsi maluku Utara | | |
| 5460.006 | Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya | 34 Provinsi | 15.229.600.000 |
| 051 | Pemantauan kualitas air laut | 34 provinsi | 5.800.000.000 |
| 052 | Evaluasi Kinerja Pelabuhan | 20 Pelabuhan | 1.200.000.000 |
| 053 | Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 74 usulan izin | 1.000.000.000 |

| KODE | URAIAN | VOLUME | ANGGARAN |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|
| 5460 | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut | | 25.300.000.000 |
| 054 | Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas) | 1 laporan | 3.000.000.000 |
| 055 | Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 2 dokumen | 3.429.600.000 |
| 056 | Pengembangan Program Pesisir dan Laut Lestari | 1 dokumen | 800.000.000 |
| 5460.007 | Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | 34 Provinsi | 4.170.400.000 |
| 051 | Penanggulangan pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut | 2 lokasi | 1.000.000.000 |
| 052 | Pemantauan sampah laut dan integrated coastal clean up | 34 Provinsi | 3.170.400.000 |

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian dan Ditjen PPKL melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 oleh seluruh unit kerja sub direktorat yang berada di lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan pemantauan kinerja dalam bentuk Sistem Pemantauan Internal Pemerintah (SPIP) agar terjadi sinergitas lintas unit kerja sub direktorat. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan SPIP Direktorat PPKPL yang dilaksanakan pada setiap tiga bulan (triwulan) dan tertuang juga pada Laporan Kinerja Direktorat PPKPL pada masa akhir pelaksanaan kegiatan atau pada awal tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN

1. Matriks Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

| Unit Kegiatan | | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|--|
| Sasaran Unit Kegiatan | | : | Meningkatnya Kualitas Air Laut | | |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2020 | Anggaran | |
| 1. | Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut | Pemulihan ekosistem pesisir dan laut pada kawasan prioritas | 4 lokasi | 3.900.000.000 | |
| 2. | | Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | 2 lokasi | 2.000.000.000 | |
| 3. | Meningkatnya pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya | Evaluasi pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan laut | 20 pelabuhan | 1.200.000.000 | |
| 4. | | Pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut akibat tumpahan minyak | 2 lokasi | 1.000.000.000 | |
| 5. | Terselenggaranya proses perizinan pengelolaan limbah cair yang dibuang ke laut | Pengendalian Pencemaran Laut akibat Kegiatan Industri melalui Izin Pengelolaan Limbah Cair yang dibuang ke Laut | 50 SK IPLC | 1.000.000.000 | |
| 6. | Menurunnya beban pencemaran sampah di pesisir dan laut | Terlaksananya pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui pemantauan sampah laut | 34 provinsi | 1.170.400.000 | |
| 7. | | Terlaksananya pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui Integrated Coastal Clean Up | 4 lokasi | 2.000.000.000 | |
| 8. | Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari | Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan Laut Lestari | 1 dokumen | 800.000.000 | |
| 9. | Penyusunan Indeks Kualitas Air Laut | Penyusunan Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Air Laut (Peta , dan Data) | 3 peta | 5.800.000.000 | |
| 10. | Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 4 dokumen | 450.828.000 | |
| 11. | Tersusunnya dokumen kebijakan dan baku mutu dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut | Penyusunan Baku Mutu dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 4 dokumen | 468.716.000 | |
| 12. | Terselenggaranya Kerjasama dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | Pengembangan Kerjasama (Luar Negeri dan Dalam Negeri) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 8 laporan | 615.566.000 | |
| 13. | Tersedianya Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang dapat diakses publik | Pengembangan dan Pemukhtahiran Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 1 laporan | 342.500.000 | |

| | | | | |
|------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 14. | Terlaksananya koordinasi dan pendukung pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | Terlaksananya , koordinasi, pameran, konsultasi publik dan ekspose pelaksanaan Program Pantai Lestari dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 1 laporan | 1.551.990.000 |
| 10. | Terlaksananya peran dan fungsi Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas) | Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas) | 1 laporan | 3.000.000.000 |
| 11. | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 12. | Pelaporan Kinerja dan Anggaran yang akuntable | Penyusunan Laporan Kinerja dan laporan Tahunan Direktorat PPKPL | 2 laporan | |
| 13. | Terlaksananya pembinaan staf | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 14. | | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | | 25.300.000.000 |

1. Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Kasubdit Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

| Unit Kegiatan | | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------|--|---|--|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | | : | Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | | Target 2020 | Anggaran |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) | | 2 dokumen | 450.828.000 |
| 2. | Pengembangan dan Pemukhtahiran data pada Sistem Informasi Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | | 1 laporan | 342.500.000 |
| 3. | Penyusunan dan Updating Baku Mutu dan Kebijakan (RPP PPKPL, Baku Kerusakan Terumbu Karang, Baku Kerusakan Mangrove, Baku Kerusakan Padang Lamun, Indeks Kualitas Air Laut) | | 5 dokumen | 468.716.000 |
| 4. | Pelaksanaan Kerjasama dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan Laut (Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri) | | 9 dokumen | 615.566.000 |
| 5. | Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas) | | 1 laporan | 3.000.000.000 |
| 6. | Terselenggaranya Pameran dalam rangka Pengembangan Program, Kerjasama PPKPL | | 1 laporan | 150.000.000 |
| 7. | Terlaksananya Dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL | | 1 laporan | 1.106.510.000 |
| 8. | Terlaksananya Ekpose dan Konsultasi Publik Program Pantai Lestari | | 1 laporan | 295.480.000 |
| 9. | Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari | | 1 dokumen | 800.000.000 |
| 10. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | | 4 laporan | |
| 11. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | | 1 laporan | |
| 12. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | | 7.229.600.000 |

Seksi Program dan Kerjasama

| Unit Kegiatan | | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut |
|------------------------------|---|--------------|--|
| Sasaran Unit Kegiatan | | : | Membantu dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Perencanaan, Program dan Kerjasama Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut |
| No | Indikator Unit Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja) | 2 dokumen | 450.828.000 |
| 2. | Pengembangan dan Pemukhtahiran data pada Sistem Informasi Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | 1 laporan | 342.500.000 |
| 3. | Pelaksanaan Kerjasama dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan Laut (Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri) | 9 Dokumen | 615.566.000 |
| 4. | Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas) | 1 laporan | 3.000.000.000 |
| 5. | Terselenggaranya Pameran dalam rangka Pengembangan Program, Kerjasama PPKPL | 1 laporan | 150.000.000 |
| 7. | Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari | 1 dokumen | 800.000.000 |
| 10. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 11. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 12. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 5.358.894.000 |

Seksi Penyusun Baku Mutu

| Unit Kegiatan | | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut |
|------------------------------|--|--------------|---|
| Sasaran Unit Kegiatan | | : | Membantu dan Menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Baku Mutu dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut |
| No | Indikator Unit Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1. | Penyusunan dan Updating Baku Mutu dan Kebijakan (RPP PPKPL, Baku Kerusakan Terumbu Karang, Baku Kerusakan Mangrove, Baku Kerusakan Padang Lamun, Indeks Kualitas Air Laut) | dokumen | 615.566.000 |
| 2. | Terlaksananya Ekpose dan Konsultasi Publik Program Pantai Lestari | 1 laporan | 295.480.000 |
| 3. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 4. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 5. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 911.046.000 |

Sub Bagian Ketatausahaan

| Unit Kegiatan | | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | | : | Penyiapan bahan dalam rangka Ketata-usahaan, perencanaan, kerjasama dan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | | 2020 | Anggaran |
| 1. | Membantu dan menyiapkan bahan dalam rangka dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL | | 1 laporan | 1.106.510.000 |
| 2. | Evaluasi dan penguatan pemulihan | | 1 laporan | 300.000.000 |
| 3. | Menjalankan kegiatan ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan kearsipan Direktorat PPKPL | | | |
| 4. | Membantu Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkup Dirtektorat PPKPL, dalam bentuk; Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Btahuan SPIP | | | |
| 5. | Terlaksananya Dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL | | 1 laporan | |
| 6. | Memeriksa hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan kearsipan Direktorat PPKPL | | | |
| 7. | Melaporkan hasil ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan kearsipan Direktorat PPKPL | | | |
| 8. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | | 4 laporan | |
| 9. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | | 1 laporan | |
| 10. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | | 1.406.510.000 |

2. Subdit Inventarisasi dan Status Mutu

Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | Target 2020 | Anggaran |
| 1. | Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | 4 lokasi | 2.000.000.000 |
| 2. | Evaluasi Kinerja Pelabuhan | 20 pelabuhan | 1.200.000.000 |
| 3. | Pemantauan Kualitas Air Laut (Sampling, Ekspose, Publikasi IKAL) | 34 provinsi | 5.800.000.000 |
| 4. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 5. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 9.000.000.000 |

Seksi Inventarisasi

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|---|--|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | 4 lokasi | 2.000.000.000 |
| 2. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 3. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 4. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 5. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 2.000.000.000 |

Seksi Status Mutu

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Evaluasi Kinerja Pelabuhan | 20 pelabuhan | 1.200.000.000 |
| 2. | Pemantauan Kualitas Air Laut (Sampling, Ekspose, Publikasi IKAL) | 34 provinsi | 5.800.000.000 |
| 3. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 4. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 5. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 6. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 7. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 7.000.000.000 |

3. Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Wilayah I

Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah I

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|---|---|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | Target 2020 | Anggaran |
| 1. | Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah I | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| 2. | Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah I | 24 provinsi | 790.000.000 |
| 3. | Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah I | 3 lokasi | 300.000.000 |
| 4. | Pelaksanaan clean up pada lokasi pesisir dan laut akibat tumpahan minyak dan lainnya | 2 lokasi | 300.000.000 |
| 5. | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 35 Izin | 600.000.000 |
| 6. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 7. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 8. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 3.790.000.000 |

Seksi Pencegahan dan Pemantauan Wilayah I

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|---|---|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Pemulihan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah I | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| 2. | Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah I | 24 provinsi | 790.000.000 |
| 3. | Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah I | 3 lokasi | 300.000.000 |
| 4. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 5. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 6. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 2.890.000.000 |

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah I

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------------|---|---|--------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Pelaksanaan clean up pada lokasi pesisir dan laut akibat tumpahan minyak dan lainnya | 2 lokasi | 300.000.000 |
| 2. | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 35 Izin | 600.000.000 |
| 3. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 4. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 5. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 900.000.000 |

4. Sub Dit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah II

Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah II

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------|---|---|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | Target 2020 | Anggaran |
| 1. | Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah II | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| 2. | Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah II | 10 provinsi | 380.400.000 |
| 3. | Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah II | 3 lokasi | 300.000.000 |
| 4. | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 15 Izin | 400.000.000 |
| 5. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| 6. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 7. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 2.880.400.000 |

Seksi Pencegahan dan Pemantauan Wilayah II

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------|---|--|----------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Pemulihan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah II | 2 lokasi | 1.800.000.000 |
| 2. | Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah II | 10 provinsi | 380.400.000 |
| 3. | Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah II | 3 lokasi | 300.000.000 |
| 4. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 5. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 10. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 2.480.400.000 |

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah II

| Unit Kegiatan | : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut | |
|------------------------|---|--|--------------------|
| Sasaran Unit Kegiatan | : | Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) | |
| No | Indikator Unit Kegiatan | 2020 | Anggaran |
| 1. | Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut | 35 Izin | 400.000.000 |
| 2. | Mengikuti Pembinaan Pegawai | 1 laporan | |
| 3. | Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan | 1 dokumen | |
| 4. | Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | 4 laporan | |
| Jumlah Anggaran | | | 400.000.000 |

2. Lampiran II Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020
SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dit. PPKPL 2020